

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Menyangkut masalah kemiskinan di areal perkotaan persoalannya menjadi semakin kompleks, dimana apabila desa masih dapat mengandalkan sebagian sumber pangannya dari dalam dan tetangga sekitarnya maka masyarakat kota cenderung tidak beruntung seperti halnya masyarakat desa tersebut. Disamping itu persoalan kemiskinan di areal perkotaan juga semakin krusial terutama karena akses sosialnya yang lebih seperti perjudian, penjarahan, pelacuran, pencurian, anak jalanan dan lain-lain. Jadi Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multi dimensional, mencakup politik, sosial, ekonomi, asset, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuknya, seperti antara lain :

1. *dimensi politik*, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambil keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumberdaya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak termasuk akses informasi.
2. *dimensi sosial* sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya

masyarakat miskin kedalam institusi sosial yang ada dalam terinternalisasikannya budaya kemakmuran yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka.

3. *dimensi ekonomi*, muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak.
4. *dimensi asset*, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka termasuk asset kualitas sumber daya manusia, peralatan kerja, modal, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut diatas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu kearah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik ditingkat yang dimaksud juga dititik beratkan pada upaya pengokohan perannya sebagai motor penggerak sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat sendiri dikelurahan mereka sehingga diharapkan tidak ada kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih

---

<sup>1</sup> Modul Materi-Materi Pelatihan BKM Tahap II, hal 2.

layak huni didalam pemukiman yang responsive, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penyelesaian, persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan structural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi serta dalam jangka panjang, mampu menyediakan akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya maupun penyuaran aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Kepada organisasi masyarakat warga yang dimaksud, yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya untuk mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Dana tersebut di manfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembung warga, baik dalam bentuk kredit mikro (dana bergulir) maupun hibah untuk kegiatan yang berguna bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana dan sarana dasar perumahan dan pemukiman. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat, melalui pendampingan intensif oleh fasilitator kelurahan ditiap kelurahan peserta P2KP.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung kemasyarakat kelurahan sasaran, P2KP tahap sebelumnya cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat ter organisasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Meskipun demikian, pengalaman P2KP tahap sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan P2KP untuk menumbuhkan partisipasi dan membangun kapasitas organisasi masyarakat warga setempat, ternyata belum diimbangi dan pengakaran kelembagaan lokal tersebut, serta belum tumbuhnya prakarsa, peran dan dukungan yang memadai dari pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya, seperti pemerintah daerah, dunia usaha dan kelompok pemeduli/ahli lainnya (LSM professional, perguruan tinggi, ulama, dll). Sehingga belum terwujud kerjasama dan dukungan serta gerakan sinergis yang optimal terhadap upaya masyarakat untuk menaggulangi kemiskinan.

Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa penyempurnaan yang mampu mendorong dan melembagakan peran masyarakat lokal dengan lebih menekankan partisipasi dan manajemen masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Pola tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran kritis masyarakat dapat mengakar serta membudaya. Artinya, program penanggulangan kemiskinan benar-benar terwujud menjadi gerakan masyarakat. Lebih dari itu, posisi dan peran masyarakat juga diperkuat dengan membangun sinergi dan kepedulian bersama antara masyarakat dan pemerintah local, dunia usaha dan kelompok pemeduli (LSM, profesional, ulama, universitas,dll) sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab dan gerakan bersama.

Penyempurnaan pola penanggulangan kemiskinan tersebut, selanjutnya diakomodasi dalam P2KP tahap kedua, melalui pengembangan kapasitas masyarakat dan pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya.

Masalah penanggulangan kemiskinan telah lama menjadi pokok perbincangan dalam penyusunan strategi pembangunan suatu Negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi harus diusahakan sedemikian rupa, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan terjadinya kenaikan pendapatan, dianggap mampu menyelesaikan masalah-masalah penanggulangan kemiskinan.

Efektivitas dalam program P2KP yang lebih berhasil guna dan berdaya guna berarti tercapainya tujuan dari program P2KP yang dikehendaki sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan juga bahwa hasil-hasil pembangunan yang dicapai saat sekarang harus setingkat lebih maju dan meningkat dari tahun ke tahun.

Efektivitas P2KP dapat tercapai, apabila di dalam menentukan program-program P2KP harus serealistis mungkin dan dapat dilaksanakan. Untuk itu dalam pembuatan program P2KP harus benar-benar mempertimbangkan keadaan wilayahnya, kemampuan untuk melaksanakan dan juga alokasi waktu yang tepat, dengan demikian tujuan P2KP akan dapat tercapai. Efektivitas P2KP dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan atau hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Dengan demikian hasil yang dicapai dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Areal Perkotaan (P2KP) di Lingkungan Krobokan Kelurahan Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi harus mampu membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih maju dan sejahtera

adil dan merata segala segi kehidupan dan seluruh lapisan masyarakat merupakan wujud proses pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Areal Perkotaan (P2KP) yang efektif.

Tujuan dari P2KP dapat dikatakan berhasil, tidak hanya apabila proyek tersebut berhasil mengurangi jumlah orang miskin atau berhasil menyediakan jalan mulus dan jembatan yang kokoh, tetapi juga harus diukur dengan sejauh mana proyek tersebut dapat menumbuhkan kemauan dan kemampuan masyarakat itu untuk mandiri.

Artinya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk memberantas kemiskinan dan menyelesaikan serta mengembangkan hasil-hasil proyek baik yang berasal dari usaha sendiri maupun berupa prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu.

Melihat uraian di atas dapat diasumsikan bahwa efektifitas P2KP itu dipengaruhi oleh banyak faktor baik intern maupun ekstren. Seperti misalnya pada kondisi fisik lokasi, budaya lokal, pendapatan serta mata pencarian atau pekerjaan masyarakat, sarana dan prasarana dasar lingkungan yang tersedia.

Banyak dan bervariasi faktor tersebut di atas sangat mempengaruhi efektifitas P2KP yang dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaannya P2KP di Lingkungan Krobokan Kelurahan Kampung Mandar tidak jauh berbeda dengan lingkungan yang lain banyak terdapat suatu permasalahan yang menimbulkan terganggunya keefektifitasan dari P2KP. Hal ini bisa dilihat dari kondisi masyarakat di Lingkungan Krobokan yang sampai saat ini masih banyak yang jauh dari kata sejahtera walaupun sudah mendapatkan dana

pinjaman dari P2KP, menjadi suatu pertanyaan untuk apa uang pinjaman yang diberikan P2KP kepada masyarakat penerima bantuan yaitu kelompok KSM di Lingkungan Krobokan? Padahal seyogyanya uang pinjaman tersebut digunakan sebagai tambahan modal untuk berusaha, dan nantinya modal pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan dengan bunga sebesar 1,5%. Ketentuan tersebut tidak memberatkan para kelompok KSM di Lingkungan Krobakan, akan tetapi pada kenyataannya proses pengembalian modal pinjaman P2KP kepada BKM Barokah Kelurahan Mandar tidak berjalan dengan lancar, masih banyak sekali kelompok KSM yang menunggak dan sampai-sampai tidak mampu untuk membayar sehingga mengakibatkan kredit macet. Kredit macet yang dimaksud adalah tidak sesuai jumlah pengembalian modal dengan jumlah pinjaman modal awal, sehingga mengakibatkan pinjaman selanjutnya yang diajukan oleh BKM Barokah kepada BRI dengan jumlah tertentu tidak bisa dipenuhi semua. Sedangkan antrian para kelompok KSM yang sudah menunggu untuk meminjam modal cukup banyak.

Proses P2KP dari mulai pencairan dana sampai pengembalian dana dilakukan secara kemitraan antara BKM Barokah dengan Bank BRI cabang Banyuwangi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Sarana prasarana dasar di Lingkungan Krobokan sangat minim contohnya kondisi jalan yang menghubungkan antara lingkungan satu dengan yang lain rusak berat dan tergenang air karena sarana irigasi sangat minim, sungai-sungai yang melintasi Lingkungan Krobokan kotor dan sangat bau

karena sungai tersebut tersumbat oleh sampah yang dibuang oleh masyarakat sekitar. Selain itu kurangnya sarana dan pemeliharaan MCK di Lingkungan Krobokan mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengeluh dan mengharapkan keadaan sarana MCK yang perlu perbaikan.

Oleh karena itu, penulis ingin melihat sejauh mana efektifitas Tujuan P2KP dari program yang ditawarkan kepada masyarakat di Lingkungan Krobokan Kelurahan Mandar Kabupaten Banyuwangi dapat tercapai melalui P2KP dengan program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah dan masyarakat selama kurun waktu 2004-2006.

Diharapkan pengembangan proyek ini mampu melandasi tumbuh dan berkembangnya “gerakan masyarakat” pembangunan oleh masyarakat dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan kelompok lainnya.

Pada prakteknya P2KP menekankan pada pentingnya proses pembangunan yang efektif sebagai inti dan penggerak sekaligus agen sosial pembangunan dimasing-masing komunitas. Melalui pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) program P2KP mencoba membangun dan memperkuat institusi komunitas atau masyarakat lokal, agar dalam jangka panjang menjadi agen perubahan sosial masyarakat yang efektif.

Singkatnya P2KP dirancang dengan mencoba mengembangkan apa yang disebut *social capital* atau model sosial komunitas, agar jangka panjang mampu menjadi penggerak komunitas tersebut.

Tabel I.1

## Jumlah Keluarga Miskin / pra-sejahtera di Kelurahan Kampung Mandar

Lingkungan	Keluarga miskin	%	Lingkungan	Keluarga miskin	%
Krajan, 01/01	42 KK	19,4	Krobokan 01/01	27 KK	10,1
Krajan, 01/02	17 KK	7,8	Krobokan 01/02	16 KK	5,9
Krajan, 01/03	19 KK	8,8	Krobokan 01/03	22 KK	8,2
Krajan, 02/01	17 KK	7,8	Krobokan 02/01	23 KK	8,6
Krajan, 02/02	6 KK	2,8	Krobokan 02/02	18 KK	6,7
Krajan, 02/03	28 KK	12,9	Krobokan 02/03	51 KK	19,1
Krajan, 03/01	49 KK	22,6	Krobokan 03/01	37 KK	13,9
Krajan, 03/02	18 KK	8,3	Krobokan 03/02	61 KK	22,8
Krajan, 03/03	21 KK	9,7	Krobokan 03/03	12 KK	4,5
Jumlah	217	100%	Jumlah	267	100%

Sumber data Keiskins BKM Barokah tahun 2003- 2004

Dipilihnya Lingkungan Krobokan di Kelurahan kampung Mandar sebagai lokasi sasaran dari program P2KP disebabkan karena jumlah keluarga miskin / pra sejahtera di lingkungan tersebut sangat banyak dibandingkan dengan lingkungan yang lain. Kelurahan Kampung Mandar mempunyai dua Lingkungan yaitu Lingkungan Krajan dan Lingkungan Krobokan, jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 3.567 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.235 KK.<sup>2</sup> Dari jumlah Kepala Keluarga (KK) tersebut yang termasuk kepala keluarga miskin sebanyak 484 KK dengan pendapatan perbulan Rp.( 50.000,00 ) sampai dengan Rp.( 250.000,00 ), sedangkan

<sup>2</sup> Sumber Data dari Profil, Kelurahan Kampung Mandar tahun 2004-2006

jumlah keluarga miskin di Lingkungan Krobokan sebanyak 267 KK lebih besar 55,2 % dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin di daerah Lingkungan Krajan yaitu sebanyak 217 KK sebesar 44,8 %. Jumlah anggota keluarga di Lingkungan Krobokan yang sebagian besar antara 1 sampai 5 orang dan ada yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 5 orang. Pendapatan keluarga miskin di Kelurahan Kampung Mandar didasarkan atas pendapatan rumah tangga untuk setiap orang pertahun yang dinilai setara dengan ( 240 ) kg beras untuk rumah tangga pedesaan dan ( 360 ) kg beras untuk rumah tangga perkotaan, sesuai dengan harga pasaran beras di desa setempat<sup>3</sup>. Pendapatan tersebut meliputi pendapatan pokok dan sampingan seluruh keluarga terutama kepala keluarga dan istri kepala keluarga dibagi jumlah anggota keluarga yang bersangkutan. Dengan adanya program P2KP tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Lingkungan krobokan Kelurahan Kampung Mandar. Hal inilah yang bagi penulis berkaitan dengan pemilihan Lingkungan Krobokan Kelurahan Kampung Mandar sebagai daerah penelitian, karena memiliki jumlah keluarga pra-sejahtera yang cukup besar bila dibandingkn dengan Lingkungan lain di wilayah Kelurahan Kampung Mandar.

Pelaksanaan kegiatan P2KP ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang adil dan merata sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan

---

<sup>3</sup> Sumber Data BKM Barokah, Kelurahan Kampung Mandar.

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat maka hasil-hasil pembangunan harus kembali kepada rakyat.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik suatu permasalahan sebagai berikut: **“Bagaimana Analisis Efektifitas Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Areal Perkotaan lingkungan Krobokan Kelurahan Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi periode Tahun 2004-2006?”**.

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada setiap penelitian pasti terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai baik itu bagi si peneliti maupun semua pihak-pihak yang terkait.

Adapun tujuan di dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sejauh mana efektifitas P2KP dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Lingkungan Krobokan Kelurahan Mandar Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2004-2006 berdasarkan indikator Tujuan dari P2KP itu sendiri untuk mengatasi masalah kemiskinan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Pada setiap penelitian yang dilakukan pasti terdapat manfaat baik bagi si peneliti itu sendiri maupun pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan langkah

awal untuk penelitian-penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang serta memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu sosial.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya efektivitas P2KP.
3. Sebagai bahan kajian tentang kondisi sosial masyarakat di Lingkungan Krobokan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai input atau masukan bagi peningkatan kualitas kinerja BKM di Kelurahan Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi umumnya dan khususnya di bidang sosial dan ekonomi.
4. Dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, karena di dalam penelitian pasti terdapat hal-hal baru yang ditemui atau sesuatu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, sehingga dapat menambah wawasan, memperkaya pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti maupun pihak-pihak yang terkait

#### **D. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori merupakan teori-teori yang digunakan dalam menjelaskan semua variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep tertentu dalam melakukan penelitian sehingga aktivitas ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah, dengan unsur ini maka penulis ingin mencoba menjelaskan permasalahan yang terjadi dengan cara menguraikan definisi teori.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Masri Singabuan dan Sofyan Efendi. Metodologi Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989 hal 27

## 1. Kemiskinan

Perumusan akan definisi sesungguhnya merupakan sesuatu yang problematik baik konsep maupun praktis. Terlebih apabila pendefinisian ini kemudian harus diikuti dengan satu set indikator untuk mengukur secara kuantitatif kelompok masyarakat atau individu mana yang dapat dilaksanakan atau dimaksudkan dalam kategori miskin. Kemiskinan dapat diukur dari sisi ekonomi, akan tetapi masih banyak sisi atau dimensi lain yang dapat dipakai sebagai ukuran atau indikator. Dengan kata lain kita secara sengaja melihat kemiskinan dari banyak dimensi serta menggunakan istilah yang dikenal dengan "*plural poverty*".

Istilah "*plural poverty*" digunakan untuk menggambarkan banyaknya dimensi kemiskinan, yakni kurangnya akses masyarakat terhadap banyak kebutuhan dasarnya, situasi setiap kelompok masyarakat amatlah berbeda-beda sekelompok orang yang mungkin kekurangan pangan, tetapi mempunyai cukup sandang atau papan, sementara kelompok lain kurang modal, tapi cukup pangan atau kebutuhan dasar lain. Kesimpulan absolute dapat terjadi apabila individu atau satu kelompok mengalami kekurangan dalam segala hal, sehingga bantuan apapun akan diperlukan.

Friedman (1994) melihat persoalan kemiskinan sebagai persoalan struktural dimana masyarakat miskin tidak mempunyai akses terhadap delapan kekuatan sosial yang mendasar yakni:

a. Ruang untuk hidup (*defensible life space*)

- b. Surplus waktu (*surplus time*)
- c. Pengetahuan dan ketrampilan (*knowledge and skills*)
- d. Informasi yang tepat (*appropriate information*)
- e. Organisasi sosial (*social network*)
- f. Kerjasama/jaringan sosial (*social network*)
- g. Sumber-sumber finansial (*financial resources*) dan
- h. Alat-alat untuk bekerja dan hidup (*instruments of work and livehood*).

Penduduk miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang memiliki potensial tinggi. Sementara itu desa miskin dicirikan oleh potensi sumber daya alam yang terbatas, mutu sumber daya manusia yang rendah, fasilitas perumahan dan lingkungan yang tidak memadai, sarana dan prasarana pelayanan dasar yang tidak lengkap serta kelembagaan sosial ekonomi yang tidak berkembang.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh wilayah pedesaan pada umumnya adalah terbatasnya kesempatan kerja di luar sektor pertanian sehingga pertumbuhan penduduk senantiasa diikuti oleh meluapnya tekanan atas sumber daya lahan. Wilayah desa miskin yang merupakan pusat kegiatan ekonomi tradisional sekaligus merupakan pusat konsentrasi yang merupakan pusat konsentrasi pemukiman penduduk padat. Pada kenyataannya berkembang sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya alam yang dimiliki desa itu sendiri.

Menurut H. Sumintro maskun, kemiskinan dapat disebabkan oleh empat katagori yaitu:

- a. Karena sulitnya mendapat makanan atau kalah bersaing dalam mendapatkan makanan serta makanan yang didapat tidak mengandung gizi yang cukup atau memenuhi syarat untuk hidup, bekerja dan tumbuh sebagaimana wajarnya.
- b. Karena kesulitan untuk melanjutkan hidupnya karena tidak mendapatkan pekerjaan atau yang tidak mempunyai mata pencarian untuk menghidupi keluarganya.
- c. Apabila daya beli relative rendah, hal ini diukur dengan standar kepemilikan uang.
- d. Tidak memiliki harta sama sekali<sup>5</sup>.

Saat ini banyak cara untuk mengukur kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda. Bank Dunia menetapkan bahwa batas garis kemiskinan adalah 50 dollar AS perkapita pertahun untuk daerah pedesaan dan 75 dollar AS untuk daerah perkotaan. Sayogo (1982) mengajukan kriteria untuk garis kemiskinan terletak pada jumlah pendapatan setara dengan beras, dibedakan antara penduduk desa dengan kota apabila penduduk desa sebanyak 240 Kg perkapita pertahun sedangkan penduduk kota 280 Kg perkapita pertahun. Selanjutnya kriteria miskin dibagi ke dalam tiga golongan yaitu miskin mutlak, kemiskinan relative dan tidak

---

<sup>5</sup> H. Sumintro Maskun, *Pembangunan Masyarakat Desa, Asas Kebijakan Keuangan Negara*, MW Mandala, Yogyakarta, 1993 hal 216-220

termasuk miskin. Termasuk golongan dengan kemiskinan mutlak apabila pendapatan terletak setara dengan 240 Kg beras atau kurang. Termasuk golongan relative apabila pendapatan terletak antara 240 Kg – 360 Kg beras perkapita pertahun dan dalam golongan tidak termasuk miskin apabila pendapatan lebih dari 360 Kg beras perkapita pertahun<sup>6</sup>.

Pada dasarnya masalah kemiskinan adalah bagian dari masalah yang lebih besar, yaitu masalah kesenjangan antar wilayah dan antar golongan penduduk untuk mengentaskan kemiskinan penduduk dari lingkaran kemiskinan yang dialami diperlukan adanya kebijaksanaan, komitmen, organisasi dan program serta pendekatan yang tepat lebih dari itu diperlukan juga sikap yang tidak memberlakukan orang miskin hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek orang miskin bukanlah orang yang tidak mamiliki apapun, melainkan orang yang mempunyai sesuatu walaupun sedikit dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan Repelita VI yaitu untuk menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang selaras, adil dan merata<sup>7</sup>.

## 2. Kebijakan publik (*public policy*)

Kebijakan atau *policy* adalah semacam jawaban terhadap suatu

<sup>6</sup> Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijakan Negara*, Rineka Cipta. Jakarta. 1999 hal 23.

<sup>7</sup> GBHN, Kctetapan MPR No.II/ MPR 1993, BP-7 Pusat.1995 hal 87.

masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah satu masalah dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan yang terarah<sup>8</sup>.

Selain itu *James E. Anderson* menyebutkan bahwa *Policy* adalah serangkaian yang mempunyai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu..<sup>9</sup>

Selain itu *Miftah Thoha* menyebutkan *policy* dalam arti luas mempunyai dua aspek pokok yaitu:

- a. *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan event yang tunggal/terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan: "*claim*" dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan "*incentive*" bagi tindakan bersama dengan pihak-pihak yang menetapkan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.<sup>10</sup>

*Carl Frederik* menyatakan "*policy*" adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang sekelompok atau pemerintah dalam suatu

<sup>8</sup> Hoogerwarv, *ilmu Pemerintahan*, Aditya.. Jakarta, 1983 hal.4.

<sup>9</sup> H. Affan Gafar, *Policy dan Formulation*, Rajawali, Press. Universitas 17 Agustus 45 Surabaya,, 1993, hal 6

<sup>10</sup> Miftah Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Administrasi Negara*, Rajawali, Press. Jakarta, 1993, hal 57-58

lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam jangka mencapai tujuan tertentu<sup>11</sup>.

Setelah dipaparkan mengenai *policy* (kebijakan) maka akan diuraikan juga beberapa definisi *public policy* seperti yang dikemukakan oleh Thomas R. Day:

Public policy adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (is what ever government choose to do or not to do)<sup>12</sup>.

Definisi diatas tersebut kelihatannya hanya bersifat aspirasi sepihak yang perlu disempurnakan yaitu apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memiliki atau melakukan sesuatu harus mempunyai tujuan tertentu. Namun kebijaksanaan tersebut bukanlah semata-mata keinginan pemerintah tetapi harus diperhatikan juga keinginan tuntutan-tuntutan dari masyarakat.

Dengan demikian di dalam public policy mencakup apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya dan bagaimana akibatnya.

Menurut Hogward dan Gun yang diikuti oleh Abdul Wahab, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses yang selanjutnya dikemukakan sebagai berikut:

“Kalau kita memandang kebijakan sebagai suatu proses, maka pusat perhatian diberikan kepada tahap-tahap yang biasanya dilalui oleh

<sup>11</sup> Affan gaffer, Op. Cit, hal 6

<sup>12</sup> Affan Gaffur, ibid hal 7

kebijakan itu pada umumnya, tahap-tahap / aspek proses kebijakan tersebut mencakup isu-isu, penyusunan agenda pemerintah, perumusan dan isi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dan program-program evaluasi dampak kebijakan, merevisi kebijakan/pengakhiran kebijakan”<sup>13</sup>.

Dari berbagai definisi diatas mengenai public policy dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik itu harus mengabdikan bagi kepentingan rakyat atau masyarakat, maka kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilakukan yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat.

### 3. Kebijaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan membutuhkan langkah nyata strategi berhasil memenuhi sasaran dan tujuan kebijaksanaan dan program penanggulangan kemiskinan perlu dimanfaatkan pada arah yang benar yaitu ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) pada pemberian akses dan peningkatan ekonomi rakyat. Adapun upayanya meliputi:

*pertama*, modal usaha (*investment*) yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan mekanisme penyaluran dana bantuan dan kredit lunak kepada masyarakat untuk mengembangkan kegiatan sosial ekonomi produktif yang dapat menjamin adanya surplus untuk tabungan dan akumulasi modal oleh masyarakat.

*Kedua*, SDM (*human resource*) yaitu memperkuat kapasitas SDM

<sup>13</sup> Abdul wahab, *Pengantar Kebijakan Negara*, Rineke Cipta, 1990, hal 22

dengan meningkatkan manajemen dan organisasi dalam proses pembangunan guna meningkatkan produktifitas dan daya saing melalui bantuan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.

*Ketiga, sarana (equipment) dan prasarana (infrastructure)* yaitu mengembangkan prasarana dan sarana serta jaringan pemasaran sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan input produksi dan menjual produk kepasar melalui kemitraan dengan dunia usaha dan penyediaan jasa pendukung lainnya.

*Keempat, penguatan kelembagaan dan pengembangan teknologi (institutional strengthenen and tecnologi change)* yaitu upaya meningkatkan alih informasi pembangunan terlembaga dengan baik.

*Kelima, sistem informasi (information system)* yaitu meningkatkan kemampuan pemantauan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan berbasis system informasi geografis agar dapat diketahui perkembangan pelaksanaan secara tepat arah, tepat sasaran dan tujuan.

Sasaran kebijaksanaan dan proyek penanggulangan kemiskinan sangat terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat dan khusus masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian sasaran pokok kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan adalah:

- a) Meningkatkan pendapatan masyarakat ditingkat bawah dan menurunkannya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
- b) Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif.

- c) Berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat.

Adapun kebijakan pemerintah yang utama untuk menanggulangi kemiskinan dapat ditempuh melalui 2 strategi:

1. Pendistribusian kembali kekayaan, asset dan hasil-hasil Negara yang diperuntukkan bagi kalangan miskin:
  - a. Kebijakan fiskal dan kredit
  - b. Memperbaiki akses terhadap lahan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan gizi.
  - c. Mengarahkan kembali produksi dan permintaan (*demand*) menuju kearah barang-barang konsumsi masa yang secara intensif menyerap kaum buruh melalui pengubahan pada beberapa factor dan harga produksi.
2. Merelokasikan secara marginal sumber-sumber produktif dikalangan kaum miskin.
3. Mentransfer konsumsi secara langsung.

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997 upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakkan melalui pemberdayaan (*empowerment*) sehingga diharapkan masyarakat akan mampu mengatasi persoalan kemiskinann yang dihadapi secara berkelanjutan:

- a. Sektor tradisional (pedesaan) khususnya para petani kecil yang tidak terorganisasi dan para buruh yang tidak memiliki lahan garapan.

- b. Sektor informal di perkotaan khususnya industri-industri.

Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang komprehensif yang meliputi makro dan lintas sektoral seperti:

- a. Percepatan ekonomi yang berkelanjutan
- b. Pengendalian pertumbuhan penduduk
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan akses bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UKMK) terhadap sumber pembiayaan teknologi pasar.
- d. Percepatan pembangunan desa

#### 4. Efektifitas Kebijakan P2KP

Setiap organisasi baik formal maupun nonformal menghendaki tujuannya dapat tercapai secara efektif. Efektifitas secara umum mempunyai pengertian sebagai berikut:

“Efektifitas berasal dari kata efek / aktivitas yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien juga berarti efektif. Karena dilihat dari segi hasil, tujuan dan akibat yang dikehendaki dengan perbuatan ialah tercapai bahkan maksimal (mutu dan jumlah ). Sebaliknya dilihat dari segi usaha bahwa efek yang dihasilkan tidak tercapai bahkan dengan unsur usaha secara maksimal. Setiap pekerjaan efektif belum tentu efisien karena hasil memungkinkan dapat tercapai tetapi dengan

perhimpunan materiil berupa pekerjaan dan benda.”<sup>14</sup>

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas adalah suatu sasaran / tujuan telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Jika sasaran / tujuan itu tidak selesai dengan tepat waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian efektif adalah suatu hasil yang dicapai dalam melaksanakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan. Disini berarti efektifitas dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai (*output*) / perbandingan antara output dengan tujuan, apabila suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan / mendekati tujuan maka kegiatan itu dapat dikatakan efektif.

Efektivitas dalam penelitian ini adalah suatu hasil yang dicapai dalam program tujuan dari P2KP yang mampu mendekati bahkan mencapai sasaran, yaitu mengatasi masalah pengentasan kemiskinan

Berdasarkan pendapat yang telah terurai di atas tentang pengertian efektivitas, maka dapat ditarik kesimpulan dengan kemiskinan, kiranya dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan P2KP dapat berhasil apabila pembangunan proyek-proyek yang tercakup didalamnya, baik itu dalam pembangunan fisik maupun non fisik tersebut tercapai.

---

<sup>14</sup> Prop. Dr. Sondang P. Siagian, *Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-Cita dan realita*, Aditya, Jakarta, 1995, hal 12.

<sup>15</sup> Suwarno Handoyo Ningrat, *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 1986, hal 16

Dengan demikian efektivitas dari P2KP mempunyai maksud sebagai sasaran atau tujuan dari program itu sendiri, yang mana dalam peningkatan taraf hidup masyarakat pada penelitian ini adalah kegiatan yang menyangkut pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Sepaham dengan pendapat yang dikemukakan oleh Etzioni bahwa efektivitas organisasi ditentukan oleh sejauh mana suatu organisasi mencapai sasaran atau tujuan.<sup>16</sup>

Efektivitas P2KP dapat pula diartikan sebagai suatu keberhasilan / hasil yang dicapai melalui pelaksanaan pembangunan yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh C. S. T Kansil, sebagai berikut:

“Keberhasilan pembangunan desa akan memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas wilayah yang sehat dan dinamis”<sup>17</sup>

## E. Definisi Konseptual

Yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian konsep yang satu dengan konsep yang lain agar tidak terjadi kesalah pahaman.

### 1. Kemiskinan

Banyak dimensi untuk menggambarkan kemiskinan salah satunya adalah kurangnya akses masyarakat terhadap banyak kebutuhan

<sup>16</sup> Amitai Etzioni, *Modern Organization*, New Jersey, Englewood, Cliff prentice, 1976, hal. 8

<sup>17</sup> C. S. T Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan diDaerah*, PT. Aksara Baru, Jakarta, 1984, hal 243

dasarnya. Situasi setiap kelompok orang mungkin kekurangan pangan tapi cukup sandang, pangan atau papan. Sementara kelompok lain kurang modal tetapi cukup pangan atau kebutuhan dasar lain. Kemiskinan absolute dapat terjadi apabila individu atau satu kelompok mengalami kekurangan dalam segala hal, sehingga bantuan apapun akan diperlukan.

## 2. Efektifitas

Adalah suatu hasil yang dicapai dalam proses pembangunan desa yang mampu mendekati bahkan mencapai sasaran / tujuan pembangunan desa untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

## F. Definisi Operasional

Adalah bagaimana cara mengukur atau melihat suatu variable sehingga penelitian ini akan benar-benar terarah dengan baik dan jelas. Adapun definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini diukur melalui indicator-indikator dari efektifitas Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Areal Perkotaan (P2KP) periode 2004-2006, Lingkungan Krobokan Kelurahan Kampung Mandar, Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

Efektifitas dari program P2KP secara umum diukur dengan indikator:

- 1) Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif

- 2) Penyediaan dana hibah untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang butir satu diatas.
- 3) Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok.
- 4) Penyiapan, pengembangan, dan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
- 5) Pencegahan menurunnya sumber daya manusia, melalui program santunan untuk anak yatim piatu dan orang tua jompo maupun warga yang terkena musibah / bencana yang benar-benar membutuhkan santunan.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggung jawabkan secara sistematis

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian

*“deskriptif kualitatif”* dan *“metode survey”*. Penelitian ini dimaksudkan penyusun untuk mengetahui efektivitas P2KP di Lingkungan Krobokan Kelurahan Kampung Mandar. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi dan cara yang tepat. Natsir menerangkan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Jadi penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan tidak menggunakan angka-angka kuantitatif untuk ditarik sebuah kesimpulan. Sedangkan metode survei adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang sifatnya tangibel, bersifat nyata dan dapat diamati secara langsung.

Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Tetapi untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, disamping pengungkapan fakta juga pemberian interpretasi-interpretasi yang kuat.

## **2. Unit analisis data**

Sesuai dengan masalah yang diteliti maka yang menjadi unit analisis adalah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Areal Perkotaan (P2KP).

Adapun unit analisis yang dimintai keterangan atau informasi adalah:

- Perangkat Kampung Mandar, yaitu kepala desa bersama aparat desa.
- Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Barokah.
- Kelompok keluarga yang menerima bantuan P2KP

### 3. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Krobokan Kelurahan Kampung Mandar, yaitu masyarakat keluarga pra-sejahtera yang digunakan sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan P2KP. Adapun pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut sebagai daerah penelitian sebagai berikut:

- a. Diketahui bahwa Lingkungan Krobokan mendapat kesempatan sebagai salah satu Desa/Lingkungan yang mendapat bantuan P2KP dengan jumlah keluarga miskin cukup besar bila dibandingkan dengan Lingkungan yang lain di wilayah Kelurahan Kampung Mandar, sehingga peneliti sangat berminat untuk memilih Lingkungan Krobokan sebagai daerah penelitian.<sup>18</sup>
- b. Ingin mengetahui bagaimana efektivitas dari P2KP dalam mengentaskan kemiskinan di Lingkungan Krobokan, Kelurahan Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi.
- c. Penyusun sedikit banyak mengetahui kondisi Lingkungan Krobokan Kelurahan Mandar sehingga lebih mudah melakukan penelitian.
- d. Penyusun lebih mudah melakukan penelitian karena Scope (cakupan)

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara tanggal 8 februari 2007 dengan Ketua BKM Barokah.

yang digunakan untuk penelitian lebih kecil.

#### 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder, adapun pengertian dari kedua data tersebut adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh langsung dari sumber data obyek penelitian berupa pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian. Dengan cara mengamati dan menganalisis data yang ada. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Ketua BKM Barokah beserta anggota dan UPK di Kantor Kelurahan kampung Mandar.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil atau bahan dokumenter tentang daerah penelitian, pengamatan, dan pencatatan dokumen yaitu berupa data-data yang diperoleh dari kepustakaan, catatan-catatan dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang di hadapi.<sup>19</sup>

#### 5. Teknik pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang objektif, penulis melakukan terjun ke lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah

---

<sup>19</sup> Dian Eka Rahmawati. *Diktat kuliah metodologi Penelitian Sosial*, Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004 hal 1

dengan cara studi pustaka atau teknik dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi teori-teori, serta peraturan dan informasi lain dari buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

**a. Observasi**

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mengadakan dan pencatatan secara sistematis pada obyek yang diteliti.<sup>20</sup>

Dalam hal ini yang penulis amati secara langsung adalah sarana fisik di Lingkungan Krobokan, aktivitas BKM Barokah dan kelompok KSM. Dimana peneliti secara langsung melihat kondisi yang sebenarnya yang ada di lapangan, sehingga ini bermanfaat untuk mendukung serta melengkapi analisa data yang sudah ada.

**b. Interview/ Wawancara**

Yaitu pengumpulan data dengan Tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dari informasi dan tokoh-tokoh kunci yang terkait. Manfaat teknik ini adalah menjelaskan sedetail-detailnya pertanyaan yang diajukan.

Untuk itu responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

- 1 Ketua BKM Barokah di Kelurahan Kampung Mandar.
- 2 Kelompok KSM sebagai masyarakat penerima bantuan P2KP di Lingkungan Krobokan

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Researrh II*, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986

Dengan demikian diharapkan agar responden yang akan diwawancarai tersebut diatas dapat memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Maka pada taraf tertentu berdasarkan kajian yang akurat memperoleh hasil analisis yang sinkron dengan keadaan yang dihadapi.

### **c. Dokumentasi**

Yaitu suatu metode atau cara untuk mendapatkan suatu data yang diperlukan. Dalam mendapatkannya dapat berupa arsip atau dokumen, tulisan catatan, foto, tabel, maupun peta tempat yang di jadikan penelitian atau catatan. Pengambilan datanya berasal dari Kelurahan Kampung Mandar yang berupa laporan dan pelaksanaan P2KP yang sudah dilaksanakan.

Hal ini dilakukan untuk melengkapi pengetahuan secara lebih terhadap suatu kasus dan memperkuat kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini. Dimana dokumentasi yang ada dapat memberikan gambaran tentang keadaan daerah penelitian.<sup>21</sup>

## **H. Teknik Analisis Data**

Data yang berhasil dikumpulkan baik data kualitatif maupun kuantitatif, akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Ibid, hal 136

“Data-data yang diperoleh dari metode interview dan metode observasi dalam penelitian ini akan dikelompokkan, dipelajari, diseleksi, disederhanakan dan diambil intisarinya untuk disajikan secara tertulis, sehingga penelitian ini tidak sebatas pada pengumpulan dan penyusunan data saja tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi data tersebut”.

Adapun analisa data kualitatif menurut koentjoroningrat adalah sebagai berikut:

“Analisa data kualitatif merupakan data yang dikumpulkan hanya sedikit-sedikit bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak disusun dalam suatu klasifikator”<sup>22</sup>

Yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Areal Perkotaan (P2KP) pada masyarakat di Lingkungan Krobokan.

---

<sup>22</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1981, hal.42